

## **IMPLEMENTASI E-ORDER DALAM PENINGKATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2022**

**Yuni Widiastuti**

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email: [diaz.yuni87@gmail.com](mailto:diaz.yuni87@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini tentang Implementasi E-Order Dalam Peningkatan Pengadaan Barang dan Jasa Di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022. Implementasi e-order merupakan bagian dari e-procurement di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat pengadaan barang dan jasa melalui e-order dilakukan oleh Bagian-bagian yang ada di lingkup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Saat ini komponen yang tersedia untuk pengadaan barang dan jasa melalui e-order masih terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi implementasi e-order, menganalisa dan mengevaluasi hambatan serta menganalisa dan mengevaluasi upaya dalam mengatasi hambatan implementasi e-order dalam peningkatan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana hasil penelitian dideskripsikan berdasarkan hasil wawancara, observasi dilapangan dan telaah dokumen. Terdapat 5 informan yang berpartisipasi untuk diwawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Implementasi E-Order dilihat dari aspek struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi dan disposisi sudah optimal. Namun perlu ada peningkatan sumber daya lainnya seperti teknologi informasi serta sarana dan prasarananya ikut serta dalam mendukung implementasi e-order.

**Kata Kunci:** Implementasi E-Order, Pengadaan Barang dan Jasa.

### **Abstract**

*The focus of this research is the implementation of E-Order in improving the procurement of goods and services in the Secretariat of Central Jakarta City Administration in 2022. E-order implementation is part of the e-procurement at the DKI Jakarta Provincial government. In the Secretariat of Central Jakarta City Administration, the goods and services are procured through e-order by the existing departments within the Secretariat of Central Jakarta City Administration, including in its Urban Villages and Sub Districts. However, the components for the goods and service procurements through e-order are currently still limited. The purpose of this research is to analyze and evaluate the implementation of E-Order in the procurement of goods and services in the*

*Secretariat of Central Jakarta City Administration in 2022. In addition, the study examined the obstacles encountered during its implementation and the measures taken to overcome them. The research utilized a qualitative descriptive method, whereby the results were based on the analysis of interview data, field observations, and desk study. There were five informants participated in the interview. Based on the research findings, implementing E-Order in the procurement of goods and services has been effective in terms of bureaucracy structure, resources, communication, and disposition. However, there is a need to improve other resources, such as information technology, facilities, and infrastructure, to support the implementation of E-Order.*

**Keywords:** *E-Order Implementation, Goods and Service Procurement.*

Diserahkan: 05-05-2023;

Diterima: 10-05-2023;

Diterbitkan: 20-05-2023

## **PENDAHULUAN**

*E-procurement* telah berkembang menjadi penggunaan teknologi elektronik untuk merampingkan dan mengaktifkan kegiatan pengadaan. *E-procurement* didefinisikan sebagai proses yang komprehensif menggunakan system Teknologi Informasi dalam membangun kesepakatan untuk akuisisi produk atau jasa (kontraktor) atau membeli produk atau jasa dengan imbalan pembayaran (pembelian). *E-procurement* mencakup berbagai elemen termasuk pemesanan elektronik, penawaran melalui internet, lelang dan terintegrasi secara otomatis dalam sistem pengadaan.

*E-procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan *e-procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan. Melalui *e-procurement* transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat diperoleh melalui akses yang lebih baik ke informasi. Hal ini dapat membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi korupsi, yang merupakan masalah besar di banyak negara berkembang.

*E-procurement* telah memberikan manfaat yaitu keuntungan langsung (meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi) dan keuntungan tidak langsung (*e-procurement*) membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan customer services, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja). Bahwa terdapat hambatan utama dari sistem *e-procurement* yaitu infrastruktur Teknologi Informasi yang tidak memadai dari pemasok/mitra bisnis, kurangnya tenaga teknis pada infrastruktur Teknologi Informasi dan kurangnya pengetahuan tenaga terampil. Sehingga, untuk mengatasi hambatan ini perusahaan harus lebih focus pada infrastruktur Teknologi Informasi, rantai pasokan, ketrampilan serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengadopsi *e-procurement*.

Atas dasar dimaksud Pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bulan Oktober Tahun 2019 melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta meluncurkan aplikasi E-Order. Melalui aplikasi ini, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat mengikuti kegiatan lelang yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala BPPBJ DKI Jakarta pada saat itu, Blessmiyanda mengatakan, dari aplikasi ini, pelaku UMKM binaan bisa berhubungan langsung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengadaan barang dan jasa yang nilainya di bawah Rp 50 juta. Jadi melalui aplikasi ini pelaku usaha langsung berhubungan dengan pengguna anggaran. Ia menjelaskan, para pelaku usaha yang ingin mengikuti proses pengadaan barang dan jasa harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan binaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta.

Dengan adanya aplikasi ini, pasar akan tercipta lebih baik dan partisipasi masyarakat juga meningkat, saat ini tercatat ada 60 ribu pelaku UMKM binaan Dinas KUMKMP DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, 30 persennya ditargetkan dapat berpartisipasi dalam kegiatan lelang melalui aplikasi E-Order. di unduh pada tanggal 23 Juni 2022 <https://bppbj.jakarta.go.id/berita/post/bppbj-dki-luncurkan-aplikasi-e-order-9>). Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa sebelum penerapan E-Order, bahwa setiap SKPD/UKPD bebas melakukan pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Dengan implementasi E-Order SKPD/UKPD dalam melakukan pengadaan barang dan jasa menjadi memiliki target yang tepat sehingga dapat membantu keberlangsungan UMKM yang ada di Jakarta khususnya UMKM yang berada dekat dengan tiap-tiap SKPD/UKPD tersebut.

Implementasi E-Order yang merupakan bagian dari e-procurement di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didasari atas adanya manfaat, hambatan maupun harapan kesuksesannya yang dapat meningkatkan kinerja SKPD. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi implementasi, hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan implementasi E-Order dalam peningkatan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan karena penulis bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai Implementasi E-Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022. Untuk itu diperlukan berbagai informasi dan data-data empiris yang relevan mengenai gejala-gejala (fenomena) dalam menguraikan, menggambarkan, menganalisa, dan menginterpretasikan hasil dari penelitian tentang kondisi sebenarnya mengenai Implementasi E-Order.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

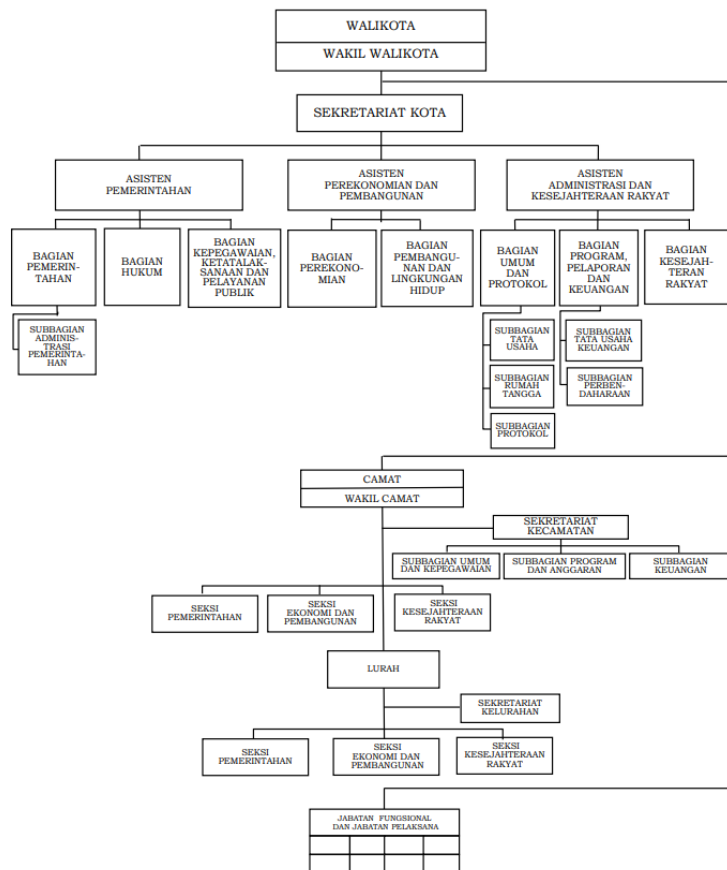
## **1. Implementasi E-Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022**

Menurut Richard M. Steers (2010), karakteristik organisasi mempengaruhi efektivitas kerja karena menggambarkan struktur yang harus dilalui oleh karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Struktur organisasi merupakan cara untuk menempatkan manusia sebagai bagian dari pada suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola – pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

### **a) Struktur Organisasi yang ada saat ini**

Efektivitas kerja pegawai, ditemukan karakteristik organisasi, lingkungan, dan kebijakan manajemen yang dapat masuk dalam kategori faktor eksternal. Dalam aspek Struktur Organisasi, seperti yang disampaikan oleh George C. Edward Edward III bahwa struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Adapun di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat struktur organisasi dalam implementasi E-Order cukup sederhana dan setiap pegawai yang bertugas sudah melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin. Sehingga implementasi E-Order di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022 dapat dijalankan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti. Struktur Organisasi sudah terstruktur dengan baik dan sudah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sehingga pelaksanaan e-order dapat dilaksanakan seperti tergambar di bawah ini:

Gambar 12. Struktur Organisasi Kota Administrasi Jakarta Pusat



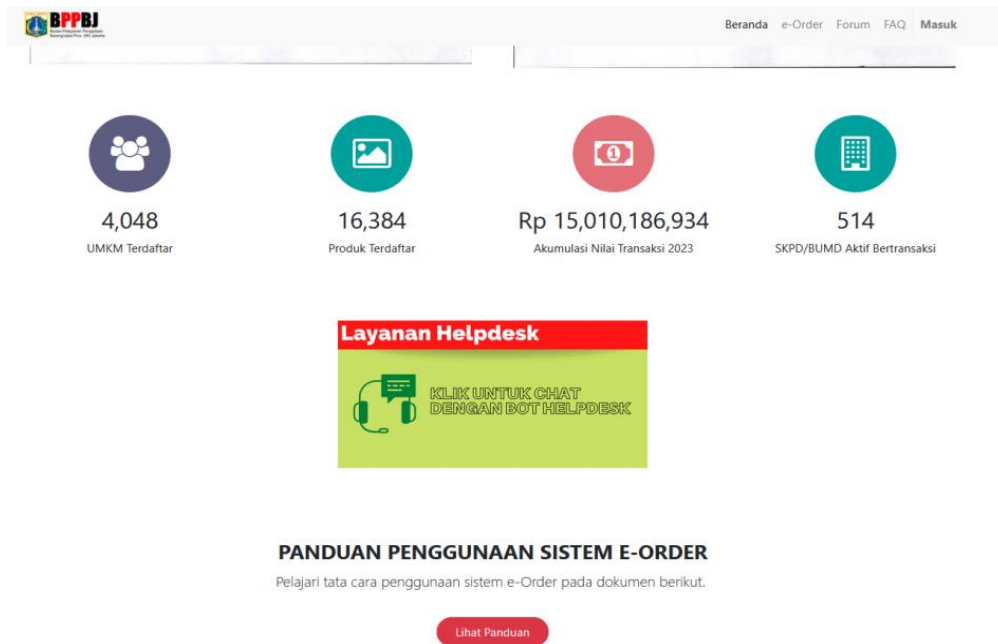
Sumber: Pergub 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

## b) Komunikasi

Komunikasi sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan implementasi e-order sesuai dengan hasil penelitian bahwa mengkomunikasikan implementasi e-order kita melaksanakannya secara masif dan memberikan sosialisasi terkait pelaksanaan e-order selain itu koordinasi dengan stackholder terkait juga membangun kerjasama pada implementasi e-order dan juga mengingatkan terus supaya menggunakan e-order karena e-order itu merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi para pedangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di wilayah masing-masing. Komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan e-order di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat menggunakan komunikasi internal dan eksternal selain komunikasi secara langsung tatap muka juga melaksanakan komunikasi dengan cara daring. Komunikasi internal merupakan komunikasi tatap muka maupun menggunakan WA group dilakukan dengan PPK, PPTK maupun pelaksana yang ada di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk pelaksanaan kegiatan e-order. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi dengan stakeholder diluar Sekretariat Kota seperti Kecamatan dan Kelurahan dilakukan dengan komunikasi tatap muka dilakukan dengan cara klinik konsultasi e-order dengan cara membagi jadwal kehadiran. Selain itu untuk mempermudah akses darimana saja UPPBJ

sudah menyiapkan halaman website khusus yaitu <https://eorder-bppbj.jakarta.go.id/> dimana kita dapat bertransaksi kapan pun dan dapat melihat menu seperti yang ada pada catalog E-Order. Kemudian pada sistem E-Order juga sudah tersedia layanan helpdesk sebagai sarana komunikasi seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 13. Layanan Helpdesk E-Order



Sumber : <https://eorder-bppbj.jakarta.go.id/>

### c) Sumber Daya

Dalam aspek Sumber Daya, seperti yang disampaikan George C. Edward III bahwa sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial, dalam implementasi E-Order di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, sumber daya yang dominan adalah sumber daya manusia, selain itu sumber daya lainnya seperti teknologi informasi serta sarana dan prasarananya ikut serta dalam mendukung implementasi E-Order. Untuk meningkatkan Sumber Daya manusia dilakukan sosialisasi dengan cara klinik konsultasi tentang E-Order.

Gambar 14. Sosialisasi Realisasi E-Order

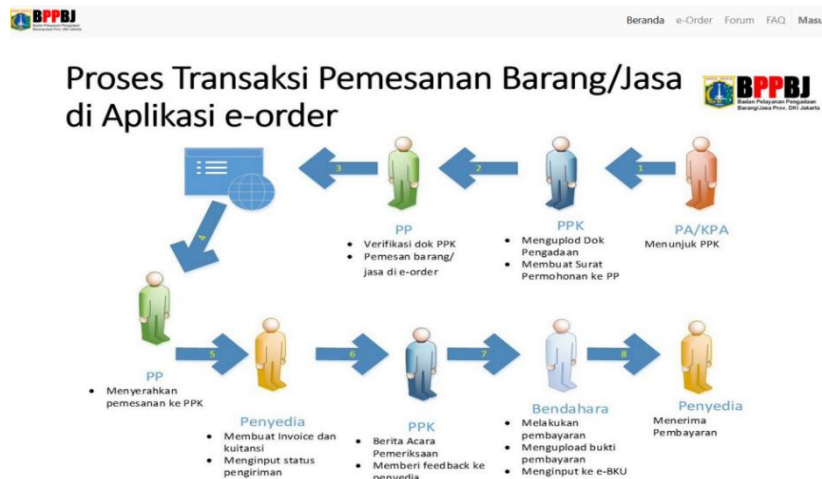


*Sumber : Observasi langsung di lapangan*

**d) Disposisi**

Dalam aspek Disposisi, menurut George C. Edward III adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam Implementasi E-Order sudah dilakukan dengan baik disposisi sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, semua Pelaksana maupun stakeholder berkomitmen untuk pelaksanaan pengadaan secara E-Order. Sebagai implementor E-Order memiliki disposisi yang baik, sehingga dapat menjalankan kebijakan E-Order dengan baik seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 15. Proses Transaksi Pemesanan Barang/Jasa



Sumber : <https://eorder-bppbj.jakarta.go.id/>

## 2. Faktor Penghambat yang dihadapi dalam Implementasi E-Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022

### a) Struktur Organisasi

Dalam rangka memperkuat fungsi organisasi serta mengimplementasikan arahan pemerintah pusat bahwa harus ada perampingan organisasi, Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat menunggu arahan dari BKD Provinsi DKI Jakarta guna melakukan pengukuhan terhadap para pegawai yang terdampak dalam restrukturisasi tersebut. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, pada penelitian terdahulu hambatan dalam Implementasi pengadaan barang dan jasa biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan pegawai dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

### b) Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan penghambat dalam Implementasi E-Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022 dari aspek sumber daya yaitu kuantitas pegawai dan kecepatan dan ketepatan dalam pemilihan keputusan. Namun hal tersebut masih bisa ditangani, namun menghambat kinerja pegawai karena tidak fokus dalam pengerjaan yang sesuai dengan tupoksinya jika kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) kurang. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, pada penelitian terdahulu hambatan dalam Implementasi pengadaan barang dan jasa biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan pegawai untuk memaksimalkan pekerjaan secara keseluruhan pegawai (Siregar and Nasution 2022).



**c) Komunikasi**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan penghambat dalam Implementasi E-Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dari aspek komunikasi yaitu lemahnya para pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui E-Order sehingga mengakibatkan adanya kesalahpahaman dalam implementasinya. Hasil penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, pada penelitian terdahulu hambatan dalam Implementasi pengadaan barang dan jasa dari aspek komunikasi biasanya disebabkan oleh lemahnya pegawai itu sendiri dalam mengkomunikasikan implementasi E-Order.

**d) Disposisi**

Dari hasil penelitian ditemukan hambatan dalam Implementasi E-Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dari aspek disposisi adalah perintah yang sudah dilakukan secara berjenjang ini masih terdapat kelemahannya yaitu pengawasan hasil disposisi itu sendiri. Hasil penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, pada penelitian terdahulu hambatan dalam Implementasi pengadaan barang dan jasa dari aspek komunikasi biasanya disebabkan oleh lemahnya hasil disposisi tersebut.

**3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi Hambatan-hambatan dalam Implementasi E-Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022**

**a) Melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev)**

Perlu adanya upaya dalam mengatasi faktor penghambat pada Implementasi E-Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat . Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi hasil yang telah dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan adanya kebijakan atau regulasi standar kerja yang sesuai. Untuk menciptakan kondusifitas pada lingkungan organisasi perlu evaluasi beban kerja yang tidak tumpang tindih dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pegawai. Dengan adanya beberapa evaluasi pada subbidang yang berkaitan dengan Implementasi pengadaan barang dan jasa melalui E-Order.

**b) Melakukan Peningkatan Sumber Daya**

Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dalam pengadaan barang dan jasa sehingga penerapan atau Implementasi E-Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta

Pusat Tahun 2022 dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi E-Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang Dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022 penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi E-Order dalam Peningkatan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022 dari struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya dan disposisi secara Umum sudah berjalan dengan baik (optimal). Namun perlu ada peningkatan sumber daya lainnya seperti teknologi informasi serta sarana dan prasarananya ikut serta dalam mendukung implementasi e-order.
2. Kemudian faktor yang menghambat implementasi e-order dalam peningkatan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dari aspek sumber daya yaitu kuantitas pegawai dan kecepatan serta ketepatan dalam pemilihan keputusan, dari aspek komunikasi yaitu lemahnya para pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui E-Order sehingga mengakibatkan adanya kesalahpahaman dalam implementasinya dan dari aspek disposisi adalah perintah yang sudah dilakukan secara berjenjang ini masih terdapat kelemahannya yaitu pengawasan hasil disposisi itu sendiri.
3. Upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan implementasi e-order dalam peningkatan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022 yaitu dengan melakukan sosialisasi dan intervensi pimpinan dalam pencapaian target E-Order serta memanfaatkan layanan Help Desk E-Order.

## BIBLIOGRAFI

- A. Muri Yusuf. 2017. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan. Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.
- Adnan, Indra Muchlis & Sufian Hamim. (2013). Manajemen Strategis Pembangunan Daerah dan Pedesaan, Trussmedia, Yogyakarta
- Amstrong, Gary & Philip, Kotler. (2012) Dasar-Dasar Pemasaran. Jilid I, Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Benyamin Molan. Jakarta: Penerbit Prenhalindo.
- Angel, G.G.(2010). PMP Certification: A Beginner's Guide. 1st edition. Singapore: McGraw-Hill
- Anggara, Sahya. (2014). "Kebijakan Publik" Bandung : CV Pustaka Setia
- Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Christopher & Schooner, (2007). "Pengadaan atau Procurement adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya".
- Edward III. C George. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press
- George R Terry. 2005. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: CV. Widya Karya.
- Harahap, Nursapia. 2020. Penelitian Kualitatif. Medan: Wal ashri Publishing
- Mukhtar.(2013) Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kuantitatif. Jakarta: Referensi (GP Press Group)
- Pramono, Joko. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Solo : Percetakan Kurnia.
- Riant Nugroho. 2014, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Samsu. (2017). Metode penelitian: (Teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed method, serta research & development).Jambi: Pustaka Jambi.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. Dasar Metode Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Suyitno. 2018. Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya. Tulungagung: Akademia Pustaka
- Usman, Husaini. (2013). Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan – Ed.4., Cet.1-. Jakarta: Bumi Aksara.
- Van Weele. (2010). A.J. Purchasing & Supply Chain Management: Analysis, Strategy, Planning and Practice. 5th edition. Hampshire: Cengage Learning.
- Wong, Jony, 2010, Internet Marketing for Beginners, Elex Media. Komputindo, Jakarta.
- Agung Suprianto, Soesilo Zauhar dan Bambang Santoso Haryono (2019) Analisis Efektivitas Sistem E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- (Studi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* Volume 5 Nomor 2 | Agustus, 2019
- Ahmad, Abd Kadir Adys dan Nasrul Haq (2020) Implementasi *E-Procurement* Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Blpbj) Sekretariat Daerah Kota Makassar. *Journal of Public Policy and Management* Volume 2 Nomor 2 | November, 2020
- Hidayat. (2015). Penerapan e-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa guna mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur). *Jurnal Ketahanan Nasional*. Volume 21 Nomor 2.
- Muhammad Faisal, Febri Yakob Paruntu, I Wayan Warka. (2017). *Implementasi E-Procurement Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa di Disfaslanal*. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* Vol 3 No 3.
- Mulyono. (2017). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 2528-3642. 32-42.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
- Instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Transaksi Pengadaan Langsung Dengan Usaha Mikro Dan/Atau Usaha Kecil Melalui Sistem E-Order.
- 

**First publication right:**

Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia

**This article is licensed under:**

